



## **BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN DHARMASRAYA**

Jln. Lintas Sumatera Km.5 Sikabau, Pulau Punjung 27573, Telp (0754) 451548  
Laman: dharmasrayakab.bps.go.id, Pos-el: bps1311@bps.go.id

---

### **SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Citra Ananda, S.Si., M.Ak.

NIP : 198806142011012013

Jabatan : Kepala Subbagian Umum

Satuan Kerja : BPS Kabupaten Dharmasraya

menyatakan bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Nomor 002 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Negara yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tahun 2024 di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat untuk Satuan Kerja BPS Kabupaten/Kota adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala BPS Kabupaten/Kota), Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara, dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa. Berdasarkan SK tersebut Kepala Subbagian Umum tidak wajib mengisi LHKPN, sehingga Kepala Subbagian Umum BPS Kabupaten Dharmasraya tidak memiliki dokumen pengumuman LHKPN tahun 2024 (lapor LHKPN tahun 2025). Berikut dilampirkan SK Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Nomor 002 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Negara yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tahun 2024 di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dharmasraya, 29 Juli 2025  
Kepala Subbagian Umum  
BPS Kabupaten Dharmasraya

**Citra Ananda, S.Si., M.Ak.**  
NIP. 198806142011012013



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 48 Padang 25135

Telepon: 442160, E-mail : [sumbar@bps.go.id](mailto:sumbar@bps.go.id) Homepage : <https://sumbar.bps.go.id>

Nomor : B-1/13000/KP.350/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Penyampaian LHKPN Penyelenggara Negara  
di Lingkungan BPS Provinsi/Kabupaten/Kota  
Se Sumatera Barat

Padang, 2 Januari 2025

Yth:

1. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Sumatera Barat
  2. Kepala BPS Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat
- di  
Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Nomor 002 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Negara Yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tahun 2024 di Lingkungan BPS Provinsi Sumatera Barat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggara Negara (PN) yang menjadi Wajib Lapor (WL) LHKPN pada tahun 2024 di lingkungan BPS Provinsi Sumatera Barat adalah sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Nomor 002 Tahun 2025 (SK terlampir).
2. Untuk penyampaian LHKPN pada tahun 2025, harta kekayaan yang dilaporkan adalah harta kekayaan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan disampaikan kepada KPK melalui *E-LHKPN* paling lambat pada tanggal 31 Maret 2025.
3. Mengingat seringnya terjadi permasalahan dalam penggunaan *E-LHKPN* pada batas akhir penyampaian, kepada WL agar melakukan penyampaian *E-LHKPN* pada **paling lambat 10 Januari 2025**.

Demikian disampaikan untuk diteruskan kepada Wajib Lapor LHKPN di Unit Kerja saudara, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dalam rangka menjaga kualitas pelayanan yang prima, BPS Provinsi Sumatera Barat berkomitmen menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, nepotisme dan menghindari adanya konflik kepentingan.

Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Sumatera Barat,



**Sugeng Arianto**





KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 002 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARA NEGARA YANG WAJIB MELAPORKAN  
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA TAHUN 2024  
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan transparansi dan komitmen bagi penyelenggara negara di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat untuk melaporkan kekayaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat tentang Penyelenggara Negara Yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

- 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
  6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
  7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
  8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
  9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429);
  10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1221);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG WAJIB MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT
- KESATU : Menetapkan penyelenggara negara di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang wajib mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan sejak:
- a. pengangkatan sebagai penyelenggara negara pada saat pertama kali menjabat;
  - b. pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
  - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara.
- KETIGA : Penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, selama menjabat wajib menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 2 Januari 2025  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT



**SUGENG ARIANTO**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 002 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARA NEGARA YANG WAJIB  
MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA TAHUN 2024 DI  
LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Nama dan NIP	Jabatan	Satuan Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sugeng Arianto, M.Si./ 196805311990031003	JPT Pratama/Kuasa Pengguna Anggaran	BPS Provinsi Sumatera Barat
2.	Boy Azef, S.ST/ 198904162012111001	Pejabat Pembuat Komitmen	BPS Provinsi Sumatera Barat
3.	Intan Adelia Sara, A.Md.Kb.N/ 200003102022012001	Bendahara	BPS Provinsi Sumatera Barat
4.	M Aulia Rahman, SST/ 199004142013111001	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	BPS Provinsi Sumatera Barat
5.	Nova Mulyati, SE/ 198711212011012019	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	BPS Provinsi Sumatera Barat
6.	Ratna Anjani, S.Ak/ 199805242022032026	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	BPS Provinsi Sumatera Barat
7.	Eriwarman, SE/ 197312301994011001	Kepala/Kuasa Pengguna Anggaran	BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai
8.	Ade Prayitno, SST/ 199003182013111001	Pejabat Pembuat Komitmen	BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai
9.	Erlina, A.Md/ 199810262022032009	Bendahara	BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai
10.	Hendro Seprita Deza, SST, M.Si/ 197009101992021002	Kepala/Kuasa Pengguna Anggaran	BPS Kabupaten Pesisir Selatan
11.	Dolly Mantora Hazmi, S.Si., M.E./ 198705072011011007	Pejabat Pembuat Komitmen	BPS Kabupaten Pesisir Selatan
12.	Rinda Erzitha, A.Md/ 199902012022032009	Bendahara	BPS Kabupaten Pesisir Selatan
13.	Zahra Rahmatika Fadhilla, S.Tr.Stat/ 200104042023022001	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	BPS Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama dan NIP	Jabatan	Satuan Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
14.	Mukhlis, SE, M.M/ 196703061993011001	Kepala/Kuasa Pengguna Anggaran	BPS Kabupaten Solok
15.	Novriady, S.Ak/ 198011132006041003	Pejabat Pembuat Komitmen	BPS Kabupaten Solok
16.	Alex Kandria/ 198406062007011004	Bendahara	BPS Kabupaten Solok
17.	M. Iqbal Hadi, SST/ 199410062017011001	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	BPS Kabupaten Solok
18.	Yuliandri, SE, MM./ 196807221994011001	Kepala/Kuasa Pengguna Anggaran	BPS Kabupaten Sijunjung
19.	Yezi Ostanofa, SE/ 197905152003122006	Pejabat Pembuat Komitmen	BPS Kabupaten Sijunjung
20.	Fadhila Dwiza Putri, A.Md.Stat/ 200012182023022002	Bendahara	BPS Kabupaten Sijunjung
21.	Ade Ayu Rahmadani Nasution, S.Si/ 198601252009022007	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	BPS Kabupaten Sijunjung
22.	Chardiman, S.ST, MM/ 196906061989031001	Kepala/Kuasa Pengguna Anggaran	BPS Kabupaten Tanah Datar
23.	Dona Dewi Putri, SST, M.E.K.K/ 198511272008012003	Pejabat Pembuat Komitmen	BPS Kabupaten Tanah Datar
24.	Heniteti, S.M/ 197212222009012002	Bendahara	BPS Kabupaten Tanah Datar
25.	Taufik, S.Si/ 198210012010031001	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	BPS Kabupaten Tanah Datar
26.	Evi Junaidi, SST, M.Si./ 197606132000121002	Kepala/Kuasa Pengguna Anggaran	BPS Kabupaten Padang Pariaman
27.	Mulyadi, ST/ 197408252003121002	Pejabat Pembuat Komitmen	BPS Kabupaten Padang Pariaman
28.	Dini Wulandari. S, A.Md./ 199711042022032014	Bendahara	BPS Kabupaten Padang Pariaman
29.	Sigit Susanto, S.Si./ 197702032011011005	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	BPS Kabupaten Padang Pariaman
30.	Yerison Buchari, SST.,M.Si/ 197309171996121001	Kepala/Kuasa Pengguna Anggaran	BPS Kabupaten Agam
31.	Adek Budiman, SST/ 198903042012111001	Pejabat Pembuat Komitmen	BPS Kabupaten Agam
32.	Neisya Aulia Fijri, A.Md.Stat./	Bendahara	BPS Kabupaten Agam

No	Nama dan NIP	Jabatan	Satuan Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
	200201052023022001		
33.	Arief Ibrahim, SST/ 198907232010121005	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	BPS Kabupaten Agam
34.	Yudi Yos Elvin, S.Si, M.Si/ 197201311994121001	Kepala/Kuasa Pengguna Anggaran	BPS Kabupaten Lima Puluh Kota
35.	Nofienti, SE/ 197409211994012001	Pejabat Pembuat Komitmen	BPS Kabupaten Lima Puluh Kota
36.	Hafazi Rozi, A. Md. Stat/ 200104272023021006	Bendahara	BPS Kabupaten Lima Puluh Kota
37.	Drs. Rinaldi, M. Si/ 196907171994011001	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	BPS Kabupaten Lima Puluh Kota
38.	Nita Andriyani, SE/ 198101312002122001	Kepala/Kuasa Pengguna Anggaran	BPS Kabupaten Pasaman
39.	Bakri Malik Ahmad Ismael, S.ST/ 199306162016021002	Pejabat Pembuat Komitmen	BPS Kabupaten Pasaman
40.	Santi Elvi, SE/ 197607311998032002	Bendahara	BPS Kabupaten Pasaman
41.	Ahmad Afif Adrinanta, S.Tr.Stat/ 199811152022011003	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	BPS Kabupaten Pasaman
42.	Abdul Razi, S.Si/ 197612291999011001	Kepala/Kuasa Pengguna Anggaran	BPS Kabupaten Solok Selatan
43.	Ekowira Susilo, SST, M.E.K.K/ 198906212012111001	Pejabat Pembuat Komitmen	BPS Kabupaten Solok Selatan
44.	Irma Putri Melani, A.Md.Stat./ 200104262023022002	Bendahara	BPS Kabupaten Solok Selatan
45.	Noviantoro Budi Purnomo, SST, M.E/ 198611122009021001	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	BPS Kabupaten Solok Selatan
46.	Taufik Annul Hayat, SST, M.Si./ 197705311999011001	Kepala/Kuasa Pengguna Anggaran	BPS Kabupaten Dharmasraya
47.	Rifki Andrizen, S.ST./ 199002032013111001	Pejabat Pembuat Komitmen	BPS Kabupaten Dharmasraya
48.	Hayatul Khairani, S.Stat./ 199507102019032001	Bendahara	BPS Kabupaten Dharmasraya
49.	Ayke Darsa, S.E./ 197407171994031001	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	BPS Kabupaten Dharmasraya

No	Nama dan NIP	Jabatan	Satuan Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
50.	Bambang Suryanggono, SST.,M.Ec.Dev/ 198209282004121001	Kepala/Kuasa Pengguna Anggaran	BPS Kabupaten Pasaman Barat
51.	Lili Triana Wardatul Jannah, S.Tr.Stat./ 199904282022012002	Pejabat Pembuat Komitmen	BPS Kabupaten Pasaman Barat
52.	Tika Novitasari, S.Tr.Stat./ 199911102022012003	Bendahara	BPS Kabupaten Pasaman Barat
53.	Destika Amelia, S.ST./ 198412062008012007	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	BPS Kabupaten Pasaman Barat
54.	Alfianto, S.Kom, M.Kom/ 197212061999031001	Kepala/Kuasa Pengguna Anggaran	BPS Kota Padang
55.	Bilal Alsyiddiq, S.Si, M.Pd/ 198604192011011013	Pejabat Pembuat Komitmen	BPS Kota Padang
56.	Rhades Fikar, A.Md/ 198912062012122002	Bendahara	BPS Kota Padang
57.	Kurnia Prima Ramadhana, SST/ 199303162014122001	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	BPS Kota Padang
58.	Amperianto, SST/ 196701201989031002	Kepala/Kuasa Pengguna Anggaran	BPS Kota Solok
59.	Aan Subrata, S.ST, M.T/ 198611042009121003	Pejabat Pembuat Komitmen	BPS Kota Solok
60.	Nurhafizah, A.Md/ 198908302011012012	Bendahara	BPS Kota Solok
61.	Yati Oktrina, SST, ME/ 198510182009022009	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	BPS Kota Solok
62.	Arieswaty, SST/ 197003291990032001	Kepala/Kuasa Pengguna Anggaran	BPS Kota Sawahlunto
63.	Rahmat Zikri, S.Tr.Stat/ 199710242019121001	Pejabat Pembuat Komitmen	BPS Kota Sawahlunto
64.	Lyra Ornila, S.Stat./ 199507272019032001	Bendahara	BPS Kota Sawahlunto
65.	Alif Rizky Rahmawan, S.Tr.Stat/ 200003222023021004	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	BPS Kota Sawahlunto
66.	Joni Suryadi, SE, MM/ 196701201993031001	Kepala/Kuasa Pengguna Anggaran	BPS Kota Padang Panjang
67.	Dwithia Handriani, S.ST/ 199007172014102001	Pejabat Pembuat Komitmen	BPS Kota Padang Panjang

No	Nama dan NIP	Jabatan	Satuan Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
68.	Novicha Haris A.Md.Stat./ 199911122023022002	Bendahara	BPS Kota Padang Panjang
69.	Rindy Primadini, S.ST/ 199105192013112001	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	BPS Kota Padang Panjang
70.	Abdi Gunawan, SE, MM/ 196908101994011001	Kepala/Kuasa Pengguna Anggaran	BPS Kota Bukittinggi
71.	Ir. Lisa Yanti/ 196912081994012001	Pejabat Pembuat Komitmen	BPS Kota Bukittinggi
72.	Putri Aprilia Susanti, A.Md. Kb.N./ 200004042022012001	Bendahara	BPS Kota Bukittinggi
73.	Gulfitri Juliani, SST/ 198407032007012005	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	BPS Kota Bukittinggi
74.	Dessi Febriyanti, M.A/ 197602071997122001	Kepala/Kuasa Pengguna Anggaran	BPS Kota Payakumbuh
75.	Afdhal Rahman, S.M/ 198701072010031001	Pejabat Pembuat Komitmen	BPS Kota Payakumbuh
76.	Rahmah Wikratul Yumni, S.Tr.Stat/ 199812032019122001	Bendahara	BPS Kota Payakumbuh
77.	Akbar Riyanti, SST/ 199211072014122002	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	BPS Kota Payakumbuh
78.	Riqadli,S.Si,MM/ 197105131992021002	Kepala/Kuasa Pengguna Anggaran	BPS Kota Pariaman
79.	Rina Ramli,S.ST/ 198312232007012005	Pejabat Pembuat Komitmen	BPS Kota Pariaman
80.	Aufa Fauziah, A.Md. Stat/ 199811292023022001	Bendahara	BPS Kota Pariaman
81.	Yunila Faira, S.ST/ 197506201996122001	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	BPS Kota Pariaman

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT



**SUGENG ARIANTO**